



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA ARENAN KECAMATAN
KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA TERHADAP
PENCALONAN KEPALA DAERAH PEREMPUAN
TAHUN 2016-2021**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh:
Hesti Nurmaulita
3312412075

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016**



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA ARENAN KECAMATAN
KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA TERHADAP
PENCALONAN KEPALA DAERAH PEREMPUAN
TAHUN 2016-2021**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh:
Hesti Nurmaulita
3312412075

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

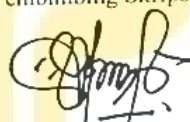
Tanggal : 13 September 2016

Pembimbing Skripsi I



Drs. Sumarno M.A.
NIP.195610101985031003

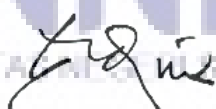
Pembimbing Skripsi II



Puji Lestari, S.Pd., M.Si
NIP. 197707152001122008

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui:
Ketua Jurusan/PKn



Drs. Drs Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

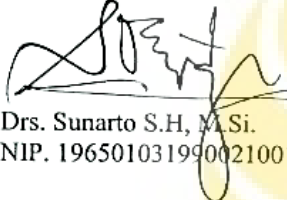
PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

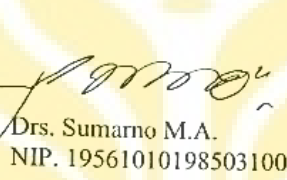
Hari : Jum'at

Tanggal : 30 September 2016

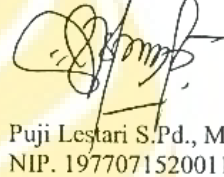
Penguji I


Drs. Sunarto S.H., M.Si.
NIP. 196501031990021001

Penguji II


Drs. Sumarno M.A.
NIP. 195610101985031003

Penguji III


Puji Lestari S.Pd., M.Si.
NIP. 197707152001122008


Mengetahui:
Dekan,


Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2016



Hesti Nurmaulita
NIM. 3312412075

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Musuh yang paling berbahaya adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”

–Andrew Jackson–

“Jenius adalah : 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras ”

–Anonimous –

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terimakasih kepada:

- 1) Kedua Orang Tuaku tercinta, Mama Khotiah dan Bapa (Alm) Nasiman yang telah melimpahkan doa, perhatian, kasih sayang dan dukungan untuk penulis.
- 2) Kakakku tersayang Hasto Nur Firman yang selalu membantu dan direpotkan oleh penulis.
- 3) Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang sebagai program studi tempat penulis mendapatkan pendidikan Sarjana.
- 4) Sahabat-sahabat tercinta Rizqi, Ummah, Arima, Wiwi, Luwes, Anggun, Firna, Ninuk dan Idelia.
- 5) Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

SARI

Nurmaulita, Hesti. 2016. *Persepsi Masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terhadap Pencalonan Kepala Daerah Perempuan Tahun 2016-2021*. Skripsi. Jurusan Politik Kewarganegaraan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Sumarno, M.A. dan Puji Lestari, S.Pd, M.Si. 98 halaman.

Kata Kunci: persepsi, masyarakat, kepemimpinan perempuan

Adanya budaya patriarki di Desa Arenan secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender. Perempuan menjadi tertinggal dalam bidang pendidikan, bidang pekerjaan dan partisipasi politik dibanding laki-laki meskipun secara hukum kesempatan untuk meningkatkan status dan perannya sudah diperoleh. Kesenjangan gender tersebut menimbulkan keinginan untuk setara atau kesamaan keadilan hak antara laki-laki dengan perempuan. Maka pada pilkada Kabupaten Purbalingga tahun 2015 perempuan mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah dan terpilih untuk memimpin Kabupaten Purbalingga pada periode 2016-2021.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terhadap pencalonan Kepala Daerah perempuan. (2) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terhadap pencalonan Kepala Daerah perempuan. (3) Mengetahui apakah persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga mempengaruhi pilihan politik mereka.

Fokus dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat Desa Arenan terhadap pencalonan Kepala Daerah perempuan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya persepsi masyarakat terhadap calon Kepala Daerah perempuan, dan Persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang yang mempengaruhi pilihan politik mereka dalam pilkada Kabupaten Purbalingga. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Analisis data dalam penelitian ini mencakup 4 hal, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat persepsi positif maupun negatif dalam memaknai pencalonan Kepala Daerah perempuan. Persepsi positif ini muncul karena adanya tanggapan yang baik terhadap pencalonan Kepala Daerah perempuan, sedangkan dalam persepsi negatif ini muncul karena seseorang yang mempersepsi sesuatu dalam hal ini pencalonan kepala daerah perempuan kurang setuju terhadap perempuan yang ikut mengambil peran sebagai kepala daerah. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pencalonan kepala daerah perempuan diantaranya; objek yang dipersepsi, alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf dan perhatian. (3) Persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga mempengaruhi pilihan politik mereka.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagi masyarakat Desa Arenan Perlu memahami perbedaan jenis kelamin dan konsep gender untuk

meminimalisasi ketidakadilan gender terutama bagi kaum perempuan, Lebih objektif dalam memberikan persepsi terhadap pencalonan kepala daerah perempuan, Memberi dukungan terhadap perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Bagi pemerintah Desa Arenan, Diperlukan pemahaman gender yang terintegrasi dalam mata pelajaran di lembaga pendidikan agar tidak terjadi kesenjangan gender, Diperlukan sosialisasi dari aktivis perempuan tentang kesetaraan gender terutama bagi masyarakat pedesaan yang masih kental dengan budaya patriarki, Lebih memberi ruang kepada perempuan untuk turut serta dalam berbagai kegiatan politik dan pemerintahan.



PRAKATA

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terhadap Pencalonan Kepala Daerah Perempuan Tahun 2016-2021” dengan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Politik Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

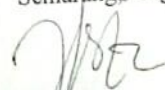
1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Moh Solehatul Mustofa, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi yang baik.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
4. Bapak Drs. Sumarno M.A. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Puji Lestari. S.Pd., M.Si, Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Sunarto S.H, M.Si. Dosen penguji yang telah menguji penulis dan memberikan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Politik, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Ibu Esti Dwi Hartanti, SE, Kepala Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalinga, atas izin penelitian, informasi, dan kebijaksanaan yang diberikan kepada penulis.
9. Masyarakat Desa Arenan, yang telah membantu memberikan data dan informasi selama proses penelitian ini berlangsung.
10. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan Politik Kewarganegaraan Angkatan 2012. Lutfhi, Dimas, Iman, Ukhti, Tiwi, Budiargo, Rifvan, Reza, Nindi, Ratna, Afdhalia, Rihma, Guzmarizqiana, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Sebagai teman berbagi rasa dalam suka dan duka serta atas kerja sama sejak mengikuti perkuliahan sampai penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, 30 Agustus 2016



Hesti Nurmaulita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI.....	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Deskripsi Teoritis.....	11
1. Persepsi Masyarakat	11
2. Masyarakat Desa.....	18
3. Feminisme	22
4. Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga.....	30
5. Perempuan	34
B. Kerangka Berfikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Latar Penelitian	48
B. Fokus Penelitian	49
C. Sumber Data.....	50

D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	51
E. Uji Validitas Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
1. Gambaran Umum masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.....	58
2. Persepsi masyarakat terhadap pencalonan Kepala Daerah perempuan.....	63
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Arenan terhadap pencalonan Kepala Daerah perempuan.....	74
4. Persepsi Masyarakat Desa Arenan mempengaruhi pilihan politik mereka.....	84
B. PEMBAHASAN	89
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	95
A. Simpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Identifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin dan gender.....	35
Tabel 4.1	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur.....	60
Tabel 4.2	Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat pendidikan	62



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Proses terbentuknya persepsi	17
Bagan 2.1 Kerangka Berfikir.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Penelitian.....	99
Lampiran 2	Pedoman Wawancara.....	105
Lampiran 3	Hasil Wawancara	107
Lampiran 4	Daftar Nama Responden Penelitian	137
Lampiran 5	Dokumentasi Kegiatan Penelitian.....	138
Lampiran 6	Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	140
Lampiran 7	Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	141
Lampiran 8	SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi I.....	142
Lampiran 9	SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi II.....	143



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil perjuangan wanita Indonesia yang dirintis oleh Ibu Kartini telah membuahkan hasilnya, yaitu semua wanita Indonesia—tanpa dibedakan kelas sosialnya dalam masyarakat—secara hukum telah memperoleh hak dan kesempatan yang sama seperti laki-laki. Misalnya, hak untuk memperoleh pendidikan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam tenaga kerja formal, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial politik. Hak dan kesempatan yang sama tersebut diperoleh dengan maksud agar perempuan Indonesia dapat meningkatkan status dan peranannya, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

Namun kesempatan yang sama tersebut belum dapat dinikmati oleh semua perempuan Indonesia. Perempuan masih banyak diperbedakan dalam memperoleh pendidikan, partisipasi dalam tenaga kerja formal, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial politik secara gender dengan laki-laki. Fakta empiris secara komprehensif menunjukkan bahwa perbedaan gender tersebut telah melahirkan peran gender yang sarat dengan makna ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan (Kasiyan,2008:45).

Peran gender diwariskan dan disosialisasikan melalui keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sosialisasi peran gender adalah menanamkan nilai-nilai gender pada anak-anak sejak lahir. Sosialisasi dalam keluarga memegang peran penting dalam perwarisan nilai-nilai, termasuk pewarisan nilai peran gender. Oleh karena itu pewarisan nilai gender dalam keluarga juga berbeda antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya tergantung dalam nilai budaya apa keluarga tersebut berada.

Dalam membahas status dan peran laki-laki dan perempuan masyarakat mengenal dua bentuk budaya yaitu patriarkhi (*patrilineal*) dan matriarkhi (*matrilineal*). Budaya patriarkhi merupakan budaya dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada perempuan, sedangkan budaya matriarkhi merupakan suatu sistem sosial yang melihat garis keturunan ibu (perempuan) lebih tinggi daripada garis keturunan ayah (laki-laki). Contoh dari budaya patriarkhi yang mengambil garis keturunan ayah seperti orang Batak, Jawa, dan sebagainya. Sedangkan budaya matriarkhi yang mengambil garis keturunan ibu adalah keturunan Padang, Minangkabau, Sumatra dan sebagainya.

Masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga seperti halnya wilayah-wilayah di Jawa menganut budaya patriarkhi. Masyarakat yang menganut budaya patriarkhi meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan, perempuan dianggap sebagai kaum nomor dua dan laki-laki sebagai terdepan.

Menurut Masudi seperti yang dikutip Faturochman, sejarah masyarakat patriarkhi sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (*superior*) dibanding perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Budaya patriarkhi tersebut secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender (2002:16). Perempuan menjadi tertinggal dalam bidang pendidikan, bidang pekerjaan dan partisipasi politik dibanding laki-laki meskipun secara hukum kesempatan untuk meningkatkan status dan peranannya sudah diperoleh. Keteringgalan perempuan tersebut berpangkal pada pembagian pekerjaan secara seksual di dalam masyarakat dimana peran utama perempuan adalah lingkungan rumah (*domestic sphere*) dan peran utama laki-laki ada di luar rumah (*public sphere*).

Kesempatan perempuan untuk masuk dalam dunia politik sebenarnya ada dan memungkinkan, Tetapi karena berbagai faktor hal itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah budaya patriarkhi yang menghasilkan pandangan stereotip bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas yang kesemuanya diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. (Astuti, 2011:16). Faktor lain adalah, ketimpangan-ketimpangan gender yang berakar dari sosial budaya mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi

lebih sedikit dibanding laki-laki, akibatnya karena perempuan tidak memiliki pengetahuan yang memadai maka ia tidak bisa berkiprah di dunia politik. Selain itu pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih rendah, mengingat dunia politik adalah milik laki-laki maka masyarakat memandang tidak perlu memberi pemahaman politik pada kaum perempuan.

Pada dasarnya setiap warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan sepanjang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak menjadi pemimpin. Hal ini antara lain ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu bahwa wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Semua perempuan Indonesia tanpa dibedakan kelas sosialnya dalam masyarakat secara hukum telah memperoleh hak dan kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam bidang pendidikan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam tenaga kerja formal dan kesempatan berpartisipasi dalam organisasi politik.

Kesenjangan gender tersebut menimbulkan keinginan untuk setara atau kesamaan keadilan hak antara laki-laki dengan perempuan. Disebut feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta harus ada upaya mengakhiri penindasan tersebut (Fakih, 2001: 89). Maka pada pilkada Kabupaten Purbalingga tahun 2015, dengan nomor urut satu

perempuan mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah dan terpilih untuk memimpin Kabupaten purbalingga pada periode 2016-2021.

Adapun pasanganurut satu dalam pilkada Kabupaen Purbalingga adalah H. Tasdi SH MM dengan Dyah Hayuning Pratiwi SE Econ (Tasdi-Tiwi). Dan pasanganurut dua adalah Sugeng SH MSi dengan Sucipto SH (Sugeng-Cipto). Anggota Tim Propaganda pasangan Tasdi-Tiwi, Yudhia Patriana mengungkapkan, berdasar data yang masuk hingga Rabu (9/12) malam, perolehan suara Tasdi-Tiwi 172.543 (54,62%), sementara Sugeng-Cipto 143.343 (45,38%). “Dengan kemenangan Tasdi-Tiwi, berarti mencatat sejarah di wilayah eks karesidenan Banyumas ada pemimpin perempuan”. Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menjadi wakil bupati perempuan pertama di wilayah Banyumas. Sementara itu, data lain dari *desk* pilkada Purbalingga menyebutkan, pasangan Tasdi unggul dengan 194.262 suara, sedangkan Sugeng-Cipto 161.151 suara. Data ini masih berupa 85,1 % data yang masuk. Tercatat juga jumlah suara tidak sah mencapai 20.456 (3,3 %), sedangkan pemilih yang tidak hadir mencapai 251.696 (40,1 %) (<http://beritajateng.net> diunduh pada 1 Agustus 2016).

Penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Desa Arenan terhadap Pencalonan Kepala Daerah Perempuan Tahun 2016-2021 ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat memandang kepemimpinan perempuan, dimana kondisi masyarakat yang berada dalam lingkungan budaya patriarki sekaligus sebagai warga Negara Indonesia dimana Hak

Asasi Manusia dijamin oleh perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Persepsi digunakan untuk mengkaji atau menganalisis mengenai pencalonan pasangan urut satu H Tasdi SH MM dengan Dyah Hayuning Pratiwi SE Econ (Tasdi Tiwi) di Kabupaten Purbalingga dimana persepsi difokuskan pada respon atau tanggapan masyarakat Desa Arenan. Kajian mengenai persepsi ini merupakan pandangan yang melihat sejauh mana dukungan yang diberikan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terhadap pencalonan Kepala Daerah perempuan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terhadap pencalonan Kepala Daerah perempuan?
3. Apakah persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga mempengaruhi pilihan politik mereka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terhadap pencalonan Kepala Daerah perempuan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terhadap pencalonan Kepala Daerah perempuan.
3. Untuk mengetahui apakah persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga mempengaruhi pilihan politik mereka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sebagai referensi dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat Desa Arenan mengenai kesetaraan gender terutama dalam hal politik perempuan, kepemimpinan perempuan, pilkada, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana aktualisasi diri untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teori konstruksi feminisme di masyarakat yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membandingkan fakta di lapangan.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi awal bagi penelitian lebih lanjut untuk peneliti yang ingin meneliti tentang persepsi masyarakat Desa terhadap kepemimpinan perempuan.

c. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan, pertimbangan dan perbandingan di kalangan akademisi, wacana keilmuan mengenai kondisi sosial politik dan permasalahan yang ada di dalamnya serta bahan acuan pada penelitian sejenis.

E. Batasan Istilah

a. Persepsi

Persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu (Walgito, 2004:88)

Persepsi adalah kesan atau penilaian seseorang terhadap suatu objek yang diperoleh berdasarkan pengamatan dengan menggunakan alat indera yang dimilikinya.

b. Masyarakat Desa

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan saling terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2000:146).

c. Feminisme

Feminisme adalah tentang perlawanan terhadap pembagian kerja di suatu dunia yang menempatkan kaum laki-laki sebagai yang berkuasa dalam ranah publik—seperti dalam pekerjaan, olahraga, perang, pemerintahan—sementara kaum perempuan hanya menjadi pekerja tanpa upah di rumah, dan memikul seluruh beban kehidupan keluarga (Watkins, 2007:3).

d. Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut asal katanya pencalonan berasal dari kata dasar calon, yang diberi awalan pe- dan akhiran -an. Calon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang akan menjadi, orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu: (guru, perwira Angkatan Darat, dan sebagainya); orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau dipilih menjadi sesuatu. Pencalonan adalah proses, cara perbuatan mencalonkan. Kepala Daerah adalah kepala Pemerintah daerah tingkat I (propinsi) atau gubernur.

e. Perempuan

Perempuan atau wanita berdasarkan jenis kelamin (*sex*) adalah sebutan yang digunakan untuk (*homo sapiens*) yang berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi berupa vagina. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Sedangkan menurut pandangan gender, perempuan adalah suatu kelompok di masyarakat yang termarginalkan secara kultural



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Persepsi Masyarakat

a Persepsi

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indra penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium (Slameto,2003:102). Moskowitz dan Orgel dalam Walgito persepsi merupakan proses yang *integrated* dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar maupun dari dalam individu yang bersangkutan. Karena persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam individu akan ikut aktif dalam persepsi (Walgito, 2004:88).

Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses pengindraan, karena proses pengindraan merupakan proses pendahulu dari persepsi. Proses pengindraan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung

sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecap, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah cara pandang atau suatu proses pemahaman dari dalam diri seseorang terhadap suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh sehingga menimbulkan kesan tertentu. Persepsi mencakup penilaian seseorang terhadap objek, dimana penilaian tersebut berbeda antara satu orang dengan lainnya.

b Faktor-Faktor Persepsi

1) Faktor-Faktor yang berperan terhadap adanya persepsi

Faktor-faktor yang berperan terhadap adanya persepsi (Walgito,2004:101) diantaranya :

a) Perhatian

Perhatian dapat diartikan sebagai pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu objek atau sekumpulan objek. Ditinjau dari segi timbulnya perhatian, perhatian dapat dibedakan atas perhatian spontan dan perhatian tidak spontan. Perhatian spontan, yaitu perhatian

yang timbul dengan sendirinya. Perhatian secara tidak spontan, yaitu perhatian yang ditimbulkan dengan sengaja.

b) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia. Untuk dapat mengetahui tingkat pengetahuan seseorang dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden.

c) Cara berfikir

Cara berfikir merupakan sebuah proses dimana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah. Proses atau jalannya berpikir itu pada pokoknya ada tiga langkah, yaitu :

1. Pembentukan pengertian
2. Pembentukan pendapat
3. Penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan

2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Dalam persepsi individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu (walgito, 2004 : 89) :

a) Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.

Objek yang dipersepsi dalam hal ini Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) merupakan anak pertama dari mantan Bupati Purbalingga periode 2000-2010 Drs. H. Triyono Budi Sasongko, M.Si. yang mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah dari H. Tasdi, SH, MM yang sebelumnya merupakan wakil bupati Purbalingga.

Objek merupakan bagian awal dan terpenting dari proses terbentuknya persepsi, individu tidak dapat memberikan penilaian melalui alat indera apabila tidak mengetahui objek.

b) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

Alat indera manusia yang selanjutnya dikenal dengan proses pengindraan, proses persepsi tidak dapat lepas dari proses pengindraan, karena proses pengindraan merupakan proses pendahulu dari persepsi. Proses pengindraan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecap, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu.

c) Perhatian

Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai

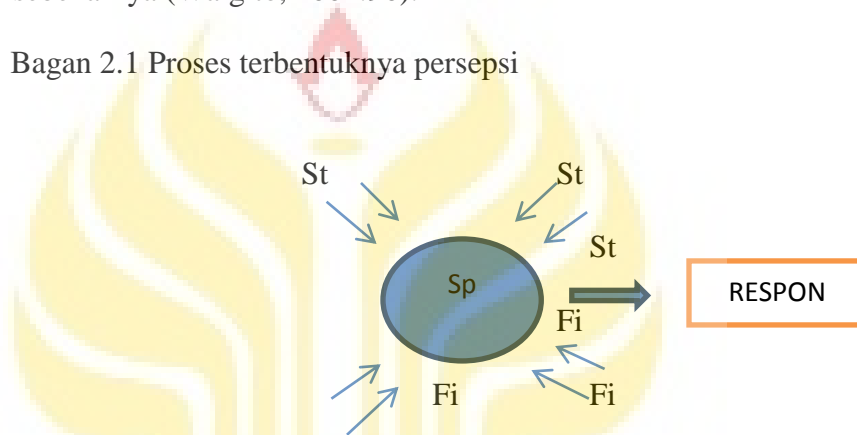
suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Perhatian yang merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada objek. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi, menafsirkan pesan dan memperoleh kesimpulan.

c. Proses terbentuknya persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya objek dan stimulus menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kelamaan atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan

bahwa taraf terakhir dari proses persepsi adalah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya (Walgito, 2004:90).

Bagan 2.1 Proses terbentuknya persepsi



Keterangan :

St : Stimulus (faktor luar)

Fi : Faktor intern (faktor dalam, termasuk perhatian)

Sp : Struktur pribadi individu

(Walgito, 2004:91)

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang

akan dipersepsi atau mendapat respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.

Stimulus dapat datang dari dalam dan luar, namun demikian sebagian besar stimulus datang dari luar diri individu yang bersangkutan. Meskipun persepsi dapat melalui macam-macam alat indera yang ada dalam diri individu, tetapi sebagian besar persepsi datang melalui alat indera penglihatan. Kebanyakan individu hanya melihat dan langsung mempresepsi tanpa memikirkan lebih lanjut apa yang dipersepsikan salah atau benar.

Masyarakat Desa Arenan dalam mempresepsikan Pencalonan Kepala Daerah perempuan juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari luar individu. Faktor dari dalam dapat berupa perasaan senang dan tidak senang terhadap suatu objek, pengetahuan, cakrawala masyarakat tentang objek. Faktor dari luar dapat berasal dari faktor lingkungan yang mempengaruhi persepsi seperti berita yang berasal dari pendapat orang lain, media massa, pengalaman masa lalu dll.

2. Masyarakat Desa

Masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya teritorial, bangsa, golongan, dan sebagainya. Dalam arti luas masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Masyarakat adalah kesatuan hidup

manusia yang berinteraksi menurut adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terkait oleh suatu identitas bersama (Koentjaraningrat, 2008:143).

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiski, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten atau Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum Desa memiliki 3 unsur yaitu :

- a Daerah dan letak dalam arti tanah yang meliputi luas dan lokasi.
- b Penduduknya dalam arti jumlah struktur mata pencaharian.
- c Tata kehidupan dalam arti corak pola tata pergaulan dan ikatan warga.

Masyarakat Desa merupakan sistem yang komprehensif artinya dalam masyarakat Desa terdapat bentuk pengorganisasian atau lembaga-lembaga yang diperlukan untuk kelangsungan hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia (Ibrahim,2003:31).

Dalam masyarakat modern terdapat masyarakat pedesaan (*rural community*) dan masyarakat perkotaan (*urban community*). Masyarakat

pedesaan merupakan masyarakat yang memiliki hubungan lebih erat dan lebih mendalam dalam sistem kehidupan yang berkelompok atas dasar kekeluargaan (Soekanto,2004:153). Selain itu masyarakat Desa juga memiliki pola pikir yang kurang rasional berorientasi pada tradisi setempat, tingkat diferensiasinya rendah, pembagian kerja secara sistematis, media komunikasi lisan dan tatap muka (konvensional) berbasis ekonomi alam (petani) teknologi sederhana, homogen dan solidaritas tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai adat istiadat lama. Adat istiadat adalah sesuatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial bersama, bekerja sama dan berhubungan erat secara lama.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka Desa dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum yang mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan Daerah tetapi menjadi *independent community*, sehingga setiap

warga Desa dan masyarakat Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri bukan dari atas ke bawah. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan atau digabungkan dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Sasaran yang ingin dicapai melalui Otonomi Desa adalah agar masyarakat Desa menjadi terbiasa memutuskan sendiri berbagai urusannya dan membuat keputusan sesuai dengan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Proses-proses tersebut secara aktif melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil senantiasa mendapat dukungan public secara luas. Agar sasaran dari otonomi daerah dapat tercapai, maka di Desa dibentuk Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati atau Kepala Daerah.

Dalam menjalankan pemerintahan Desa, pemerintah Desa menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala Desa :

- a. Bertanggungjawab kepada rakyat;
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui camat;

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan, kepala Desa dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekretaris Desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris Desa.

3. Feminisme

Feminisme adalah tentang perlawanan terhadap pembagian kerja di suatu dunia yang menempatkan kaum laki-laki sebagai yang berkuasa dalam ranah publik—seperti dalam pekerjaan, olahraga, perang, pemerintahan—sementara kaum perempuan hanya menjadi pekerja tanpa upah di rumah, dan memikul seluruh beban kehidupan keluarga (Watkins, 2007:3).

a Teori Feminisme : Perjuangan Meretas Belunggu Ketidakadilan Gender

Feminisme menunjuk pengertian sebagai ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat pada semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya (Astuti,2011:73). Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Hakikat dari perjuangan feminisme adalah

demokrasi kesamaan, martabat, dan kebebasan mengontrol raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah (Fakih,2009:79).

Sebagai sebuah paham atau gerakan kebudayaan, feminisme mempunyai sejarah yang cukup panjang, yakni dimulai di Barat sejak abad ke-17 atau sekitar tahun 1960/1970-an. Dengan ditandai diantaranya adalah terbitnya buku-buku yang ditulis oleh perempuan. Secara umum istilah feminisme adalah menunjuk pada pengertian sebagai ideologi pembebasan perempuan, karena yang melekat dalam semua pendekatannya, adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya (Kasiyan,2008:73).

Adanya anggapan kolektif, yakni bahwa feminisme itu adalah semata-mata urusan perempuan dan bukan urusan laki-laki telah berkembang di masyarakat. Akan tetapi seiring dengan pemaknaan feminisme yang aura substansinya ditangkap lebih luas dan terbuka, sebagai bagian dari komitmen upaya demokrasi kebudayaan dan kemanusiaan yang bersifat universal dan netral (kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan), maka pemahaman tentang feminisme sudah mulai beranjak, yakni bukan lagi semata-mata kajian “tentang, untuk, dari dan oleh” perempuan, yang cenderung menjadi sebuah wilayah yang eksklusif, melainkan lebih merupakan realitas inklusif yang juga menjadi urusan laki-laki.

Realitas ketidakadilan yang diterima perempuan secara sosio-kultural di masyarakat jika dibandingkan dengan laki-laki, lebih disebabkan oleh ketidakadilan gender, bukan bersifat kodrati. Oleh karena itu, secara ideologis, paham atau gerakan feminisme merupakan salah satu *prototype* perjuangan untuk mencoba meretas belenggu ketidakadilan gender (Kasiyan,2008: 77). Feminisme bukanlah perjuangan kaum perempuan di hadapan laki-laki, melainkan lebih merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju sistem yang adil, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan kata lain hakekat feminisme adalah gerakan transformasi sosial, kearah penciptaan struktural yang secara fundamental baru dan lebih baik, bagi kehidupan bersama.

Perjuangan kaum feminis untuk melakukan perubahan sehingga mendapatkan apa yang baik untuk mereka. Artinya mereka harus diberi kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Beberapa prinsip dasar feminisme adalah:

- 1) Bahwa kaum perempuan merupakan kelompok orang istimewa dengan sifat khususnya, misalnya atas dasar pertimbangan biologi seperti mempunyai kemampuan haid, hamil, melahirkan, dan menyusui, atau berdasarkan kodrat dan budaya misalnya menjadi ibu dan istri berdasarkan pengalaman mengasuh anak misalnya.

- 2) Bahwa setiap perempuan harus menjadi penentu yang baik baginya dan bersama-sama dengan kaum perempuan lain untuk sampai pada kesadaran kolektif, yaitu apa dan siapa sesungguhnya seorang perempuan itu.
- 3) Bahwa perempuan mulai pulih kesadaran dan ketidakpuasan hidupnya bahwa dunia laki-lakilah yang menentukan segala kehidupan perempuan. Kaum feminis sadar bahwa kaum laki-laki punya kekuasaan tetapi tentu saja laki-laki tidak mempunyai hak untuk mendiktekan kemaunnya terhadap perempuan.
- 4) Bahwa feminisme bertujuan untuk mengubah semua itu dan membongkar sampai ke akar-akarnya dunia laki-laki. Kekuasaannya yang tidak adil dan kesewenang-weanangannya yang menentukan apa yang dianggap benar untu kaum perempuan.

b Teori Perwakilan Politik Perempuan

Sejak lama Indonesia mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam peta perpolitikan. Undang-Undang Dasar 1945, secara formal telah menjamin partisipasi perempuan dalam bidang politik. Pada tahun 1952 misalnya, Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Perempuan (*UN Convention on Political Right of Women*) melalui UU No. 68 Tahun 1958 dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto kala itu. Undang-undang ini

memberikan perempuan, hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga legislatif Negara (Sarwono,2007:66).

Sejak saat itu, Pemerintah melakukan upaya serius memperbaiki kebijakan pemberdayaan perempuan, melalui strategi gender. Pada masa Pemerintahan Megawati, telah pula dikeluarkan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan pada bulan Februari 2003, kembali mengadopsi kebijakan kuota (yang bersifat sukarela) dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, sebagai upaya memperluas partisipasi politik perempuan.

UU No.31 Tahun 2002 mengatur fungsi dan kewajiban partai politik dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan keterwakilan dan peran perempuan dalam bidang politik. Sedangkan UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum menggarisbawahi setiap partai politik peserta pemilu mengajukan calon anggota legislatif untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Penetapan strategi-strategi untuk meningkatkan perwakilan politik perempuan dalam demokrasi-demokrasi modern merupakan suatu proses dimana ide-ide mengenai keadilan dijadikan dasar bagi kesamaan politik. Secara luas terdapat tiga strategi yang ada (Lovenduski,2008:164) yakni :

1) Retorika tentang kesamaan

Retorika tentang kesamaan merupakan penerimaan publik terhadap klaim-klaim kaum perempuan. Hal itu ditemukan dalam program-program kampanye partai dan wacana politik partai dan pidato-pidato dan tulisan para pemimpin politik. Retorika tentang kesamaan berarti kata-kata dan argumen-argumen yang dikatakan dan ditulis yang dapat berpengaruh baik pada sikap dan keyakinan. Dalam beberapa kesempatan retorika mencakup wacana feminis dan melalui pergeseran-pergeseran yang lembut dan penting dalam bahasa membuat strategi-strategi lain menjadi mungkin. Misalnya pemerintah-pemerintah telah menyepakati perjanjian-perjanjian dan protokol-protokol internasional yang menyerukan kesamaan perwakilan perempuan dan laki-laki.

Dimulai oleh kerja kaum perempuan dalam gerakan-gerakan internasional, dokumen-dokumen seperti program PBB untuk tindakan mengungkapkan klaim-klaim kesamaan dalam peristilahan-peristilahan feminis. Dokumen seperti itu telah digunakan secara berturut-turut sebagai dasar mobilisasi domestik untuk mendukung kesamaan seks. Bahasa yang digunakan sebagai kerangkanya memperoleh pengesahan sebagiannya mengalir sebagai hasil dari status perjanjian atau protokol dan mulai digunakan dalam perdebatan publik, dilaporkan dalam media

massa dan untuk membentuk pemikiran dan argumen politik. Melalui proses seperti itulah suatu wacana kesetaraan, yang dapat meningkatkan adanya landasan yang sama bagi tindakan muncul.

2) Promosi atau tindakan positif

Promosi berkaitan dengan kesamaan mencoba membawakaum perempuan kedalam persaingan politik dengan menawarkan pelatihan khusus dan bantuan keuangan, dan menetapkan target-target bagi kehadiran perempuan dan tindakan-tindakan lain untuk memungkinkan kaum perempuan tampil kedepan. Dalam demokrasi-demokrasi partai Eropa argumen-argumen pertama-tama harus dimenangkan dalam partai-partai politik, yang waktu itu memasukan ide kedalam Pemerintahan. Pemerintahan-Pemerintahan telah mendanai kampanye-kampanye kesadaran, menyediakan bantuan keuangan bagi program-program tindakan yang positif, mendanai penelitian mengenai perwakilan perempuan, termasuk organisasi-organisasi advokasi perempuan dalam konsultasi-konsultasi di semua tingkat, menandatangani perjanjian-perjanjian dan protokol-protokol internasional yang menyerukan kesamaan perempuan dan laki-laki, membuat persediaan bahwa kaum perempuan diangkat untuk kantor-kantor negara. Peningkatan kesamaan bermaksud membawa lebih banyak perempuan ke dalam politik melalui dorongan dan dengan

memfasilitasi kemampuan mereka untuk berkompetisi dalam berbagai cara.

3) Jaminan-jaminan kesamaan atau diskriminasi positif

Jaminan-jaminan kesamaan atau diskriminasi positif menghilangkan tuntutan bagi wakil-wakil perempuan. Dalam strategi-strategi seperti itu tempat-tempat disediakan secara khusus bagi perempuan dalam daftar pemilihan dan dalam badan-badan perwakilan.

Dengan lahirnya wakil-wakil perempuan dalam jumlah yang pantas (proporsional) dalam kepengurusan partai politik maupun di lembaga legislatif akan memberi peluang kepada perempuan untuk ikut membuat kebijakan-kebijakan yang adil. Atas dasar itu, maka hanya dengan jumlah kursi mereka yang signifikan dalam lembaga politik formal, kaum perempuan dapat menciptakan perubahan yang berarti.

Namun disamping kuota tentunya sikap perempuan sendiri haruslah lebih menjanjikan sikap radikal dalam tiap praktik demokrasi. Ini perlu dalam rangka membuka jalur dan masuk ke proses pengambilan keputusan yang sekian lama menempatkan perempuan pada posisi objek kebijakan. Masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi penting dalam rangka menciptakan dunia yang baru, dunia yang bebas diskriminasi.

Dengan demikian memberi tempat lebih banyak bagi perempuan dalam dunia politik akan memberikan angin segar dan harapan bagi politik yang sudah jumud, korup, dan patriarkis di Indonesia. Pemberlakuan kuota telah berlangsung, dengan persiapan yang lebih matang pada pemilu mendatang hadirnya lebih banyak perempuan di dunia perpolitikan Indonesia akan mampu membawa masyarakat Indonesia khususnya bagi kepentingan dan keterwakilan perempuan pada perubahan sistem yang berkeadilan dan bersih dari korupsi (Kusumaatmadja,2007:81).

4. Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga

Kepala Daerah adalah kepala Pemerintah daerah tingkat I (propinsi) atau gubernur. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal (1) yang berbunyi : “Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintah daerah yang disebut Kepala Daerah”. Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut untuk provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Walikota. Dimana dalam melaksanakan tugasnya (Kepala Daerah) dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah merupakan orang yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahannya.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada adalah salah satu bentuk pelaksanaan sistem demokrasi di tingkat lokal. Pada tanggal 9 desember 2015 Kabupaten Purbalingga dan beberapa daerah di Indonesia melaksanakan pemilihan Kepala Daerah langsung. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 56 ayat 1 yang dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurut pasal 18 (4) UUD 1945, pemilihan Kepala Daerah meliputi Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dilakukan pemilihan secara demokratis. Berangkat dari norma ini secara pasti, model dan mekanisme pemilihan dibuka ruang fleksibel kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan, yang tentu berbasis konteks dan kebutuhan berbangsa dan bernegara. Saat ini pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah, berdasarkan Pasal 24 ayat (5) UU No.32 Tahun 2004, yang menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat daerah.

Adapun pasangan urut satu dalam pilkada Kabupaen Purbalingga adalah H. Tasdi SH MM dengan Dyah Hayuning Pratiwi SE Econ (Tasdi-Tiwi). Dan pasangan urut dua adalah Sugeng SH MSi dengan Sucipto SH

(Sugeng-Cipto). H. Tasdi, SH, MM merupakan wakil bupati Purbalingga yang menjabat sejak 16 Mei 2014. Tasdi pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Purbalingga sejak 1999 hingga 2004 dan Ketua DPRD Purbalingga sejak 2004 hingga 2014. Dan pada Pilkada serentak tahun 2015, mencalonkan diri berpasangan dengan Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) yang merupakan anak dari mantan Bupati Purbalingga Triyono Budi Sasongko. Visi dan Misi yang mereka usung adalah sebagai berikut:

Visi : Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing, menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia/berakhlakul karimah.

Misi :

- a Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih demokratis dan berani mengambil keputusan.
- b Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakqwa kehadirat Allah SWT-Tuhan YME.
- c Mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan secara layak).
- d Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat pendidikan umum dan keagamaan serta derajat kesehatan masyarakat.
- e Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian rakyat dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

f Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dengan didukung pembangunan infrastruktur untuk memfasilitasi berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

g Mengawal kegiatan pembangunan dengan ramah lingkungan (menjaga kelestarian lingkungan hidup).

Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung mekanismenya adalah diusulkan oleh partai politik atau gabungan dengan partai politik secara berpasangan dengan catatan harus memenuhi persyaratan tertentu. Pasangan Tasdi-Tiwi Selain direkomendasikan oleh PDIP, juga dicalonkan oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tahap pencalonan dalam pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berdasarkan pada aturan pokok (Agustino,2009:91) yakni diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 4 yang menatakan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala Pemerintah provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- b. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah pasal 56 sampai dengan 199, dimana pasal 56 menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih da
- c. lam satu pasangan calon yang dilaksanakan dengan demokrasi berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara itu dalam pasal 57 menyatakan, bahwa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah komisi pemlihan umum daerah atau KPUD setempat.

- d. Undang-Undang nomor 31 tahun 2001 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 138, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4251).
- e. Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 37, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4277).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang pemilihan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- g. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 17 tahun 2005, tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005.
- h. Surat ketua DPRD tentang masa berakhirnya jabatan gubernur/bupati/wali kota.

5. Perempuan

a. Perempuan dalam Konsep Gender dan Jenis Kelamin

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata jenis kelamin (sex). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang atau bersifat seperti dalam daftar berikut : laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang merupakan ketentuan Tuhan atau

kodrat. Sedangkan konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara kultural maupun sosial. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa (Fakih,2009:8). Untuk lebih jelasnya dapat dipahami tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Identifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin dan gender

IDENTIFIKASI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SIFAT	KATEGORI
Ciri biologis	Penis Sperma	Jakun Vagina (ASI) Rahim Hamil Menyusui	Payudara Ovum Haid melahirkan Tuhan.	Tidak dapat dipertukarkan. Kodrati Pemberian Tuhan. JENIS KELAMIN/ SEKS
Sifat/karakter	Rasional Cerdas Pemberani Superior Maskulin	Kuat Emosional Bodoh Inferior	Lemah Penakut Feminin	Ditentukan oleh masyarakat. Disosialisasikan. Dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Dapat berubah sesuai kebutuhan GENDER
Peran	Kepala keluarga Pencari nafkah Pemimpin Direktur Kepala kantor Pilot Sopir	Ibu rumah tangga Manajemen rumah tangga Dipimpin Sekretaris Pramugari Perawat rumah tangga Buruh	Konstruksi masyarakat Dapat berubah sesuai kebutuhan	GENDER

(Yentriyani, 2004 : 10)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa gender lebih merupakan seperangkat karakter, peran dan perilaku tertentu yang diharapkan dimiliki oleh seseorang berdasarkan jenis kelamin (seks) yang dimilikinya—perempuan atau laki-laki—oleh masyarakat di sekitarnya. Laki-laki diharapkan memiliki karakter maskulin sementara perempuan diharapkan mengusung karakter feminin. Karakter-karakter ini lebih merupakan stereotip karena memuat bagaimana seorang perempuan atau laki-laki seharusnya sebagaimana yang diharapkan masyarakat dan bukanlah sesuatu yang instrik dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin tersebut. Stereotip ini kemudian membagi peran yang dimainkan oleh masing-masing jenis kelamin dalam kehidupan sehari-hari dimana laki-laki “dipercayakan” menjalankan peran di ranah publik dan pengambilan keputusan, sementara perempuan mengasuh ranah domestik meskipun pada kenyataannya, perempuan juga harus melangsungkan peran produktif, reproduktif dan sosial sekaligus (Yentriyani,2004:10).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sejarah perbedaan gender antara manusia jenis kelamin laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan

maupun Negara. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan (Fakih:2001:9).

Sebaliknya melalui dialektika, konstruksi sosial yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya karena kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh kepada perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya. Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu, seperti kaum perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki kuat, perkasa, dikonstruksi atau dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan oleh Tuhan. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa

setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukan kodrat (Fakih,2001:10).

Walaupun tidak mewakili sebuah kebenaran, stereotip tersebut dipercayai validitasnya dan secara turun temurun melalui sebuah proses pewarisan nilai-nilai atau sosialisasi. Dalam proses pewarisan tersebut, stereotip dan peran yang disandang oleh laki-laki dianggap memiliki nilai lebih daripada perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan kemudian menempati posisi subordinat dalam masyarakat sementara laki-laki menempati posisi yang lebih penting/unggul dalam semua aspek kehidupan daripada perempuan (Yentriyani,2004.11). Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai patriarki. Desa Arenan dan sebagian besar Desa di Pulau Jawa menganut budaya patriarki.

Dalam membahas status dan peran laki-laki dan perempuan, masyarakat mengenal dua bentuk budaya yaitu patrarkhi (*patrilineal*) dan matriarkhi (*matrilineal*). Pada budaya patriarkhi lebih mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan, sedangkan pada budaya matriarkhi lebih mengunggulkan perempuan. Masyarakat yang menganut sistem patriarki meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan. Di semua

ini kehidupan, masyarakat memandang perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya. Menurut Masudi seperti yang dikutip Faturochman, sejarah masyarakat patriarki sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (*superior*) dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender (2002: 16).

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarki. Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara. Perempuan yang tidak memiliki otot dipercayai sebagai alasan mengapa masyarakat meletakkan perempuan pada posisi lemah (*inferior*). Ideologi patriarki dikenalkan kepada setiap anggota keluarga, terutama kepada anak. Anak laki-laki maupun perempuan belajar dari perilaku kedua orang tuanya mengenai bagaimana bersikap, karakter, hobi, status, dan nilai-nilai lain yang tepat dalam masyarakat. Perilaku yang diajarkan kepada anak dibedakan antara bagaimana bersikap sebagai seorang laki-laki dan perempuan.

Ideologi patriarki sangat sulit untuk dihilangkan dari masyarakat karena masyarakat tetap memeliharanya. Stereotip yang melekat kepada perempuan sebagai pekerja domestik membuatnya lemah karena dia tidak mendapatkan uang dari hasil kerjanya mengurus rumah tangga. Pekerjaan domestik tersebut dianggap remeh dan menjadi kewajibannya sebagai perempuan.

Selain itu, keluarga yang menganut sistem patriarki memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Biasanya orang tua lebih mementingkan anak laki-lakinya untuk sekolah yang tinggi sedangkan anak perempuan diminta di rumah sehingga anak perempuan kesulitan untuk mendapat akses pengetahuan (Astuti,2011:102). Kondisi demikian ini berdampak pada relasi yang tidak setara, dan rentan terjadinya ketidakadilan sosial berbasis gender di masyarakat, dan jika ditinjau dari analisis gender mencerminkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

b Analisis Gender dalam Gerakan Transformasi Perempuan

Secara biologis kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan, menyusui, dan selanjutnya memiliki peran gender sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak. Dari studi yang dilakukan menggunakan analisis gender ini ternyata banyak ditemukan

berbagai manifestasi ketidakadilan yang berasal dari peran gender dan perbedaan gender diantaranya :

1) Marginalisasi (Pemiskinan) Perempuan

Pemiskinan adalah suatu proses penyisihan yang mengakibatkan kemiskinan bagi kaum (biasanya) perempuan. Proses marginalisasi disebut juga sebagai proses pemiskinan, seringkali menimpa baik laki-laki maupun perempuan di sebuah Negara karena berbagai peristiwa, misalnya oleh bencana alam, konflik bersenjata, pengusuran, proses eksploitasi, atau bahkan kebijakan pembangunan (Astuti,2011:87). Ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan yang disebabkan oleh keyakinan gender. Pemiskinan berbasis gender ini berbeda jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi terhadap kaum perempuan, seperti karena kebijakan Pemerintah, interpretasi agama, tradisi dan kebiasaan. Salah satu kasus marginalisasi di Desa Arenan adalah adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, karena nantinya juga hanya akan mengurus pekerjaan dapur. Selain itu, jika anak perempuan sekolah tinggi takut menjadi perawan tua, sehingga ketika anak sebenarnya masih bisa memasuki usia sekolah sudah keburu dinikahkan. Dampaknya, jika perempuan harus bekerja maka sektor pekerjaan

yang dapat mereka masuki adalah sektor pekerjaan subsistem atau buruh dengan upah yang rendah karena mereka berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan. Sebaliknya pemiskinan juga jarang dialami anak laki-laki, karena anggapan bahwa laki-laki adalah penyangga keluarga maka mereka berkewajiban membantu orangtua ikut mencari nafkah, bahkan sejak usia dini.

2) Subordinasi (Penomorduaan)

Secara umum subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya (Astuti,2011:90). Konsep subordinasi saling tumpang tindih dan terkait dengan makna sebagai berikut. *Pertama*, sebagai proses pengucilan (*exclusion*), yakni perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau dari jenis-jenis kerja upahan tertentu. *Kedua*, sebagai proses penggeseran perempuan ke pinggiran (*margin*) dari pasar tenaga kerja, yang dimaksudkan adalah kecenderungan bagi perempuan untuk bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak stabil, upah rendah, atau dinilai tidak terampil. *Ketiga*, sebagai proses feminisasi atau segregasi yang maknanya adalah yakni dengan adanya pemusatan perempuan kedalam jenis pekerjaan tertentu, bisa dikatakan jenis pekerjaan tersebut sudah terfeminisasi dan tersegregasi (Kasiyan,2008:59). Subordinasi terhadap perempuan di masyarakat pada umumnya

masih terkait dengan konsekuensi adanya konsepsi stereotip feminitas yang dilabelkan kepadanya. Bentuk subordinasi terhadap perempuan (Astuti,2011:90) antara lain :

- a) Lebih banyak perempuan buta aksara dibanding laki-laki
- b) Laki-laki lebih bebas memilih pekerjaan/profesi ketimbang perempuan
- c) Mengurus pekerjaan rumah tangga dianggap kodrat perempuan.

3) Stereotip

Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Biasanya stereotip merugikan pihak lain atau melahirkan ketidakadilan (Astuti,2011:83). Salah satu jenis stereotip adalah yang bersumber dari pandangan gender, yang akibatnya merugikan perempuan karena dengan pelabelan tersebut perempuan mengalami pembatasan, kesulitan, dan pemiskinan.

Sebagai contoh perempuan bersolek diasumsikan untuk memancing perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan hanya tambahan dan oleh karenanya boleh saja dibayar lebih rendah (Fakih,2001:17).

4) Kekerasan (*Violence*)

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk verbal seperti pelecehan dan penciptaan ketergantungan (Fakih,2001:17). Kekerasan terhadap perempuan merupakan produk sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan memomorsatukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah daripada laki-laki (Astuti,2011:94). Pandangan feministik ini sekaligus menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah konsekuensi logis dan sesuatu yang dianggap umum terjadi sebagai konsekuensi struktur masyarakat yang patriarki. Contohnya pemerkosaan, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di rumah tangga, bentuk peniksaan yang mengarah pada organ alat kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran.

5) Beban Ganda (*Double Burden*)

Beban ganda (*double burden*) berkaitan dengan beban kerja, yakni pembagian tugas dan tanggungjawab yang selalu memberatkan perempuan (Astuti,2011:85). Adanya anggapan bahwa perempuan secara alamiah memiliki sifat memelihara, merawat, mengasuh dan

rajin, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. (Fakih,2001:21). Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya terlebih jika perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkaitan dan secara dialektika saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara sempurna, yang lambat laun baik laki-laki dan perempuan menjadi terbiasa dan peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat.

B. Kerangka Berpikir

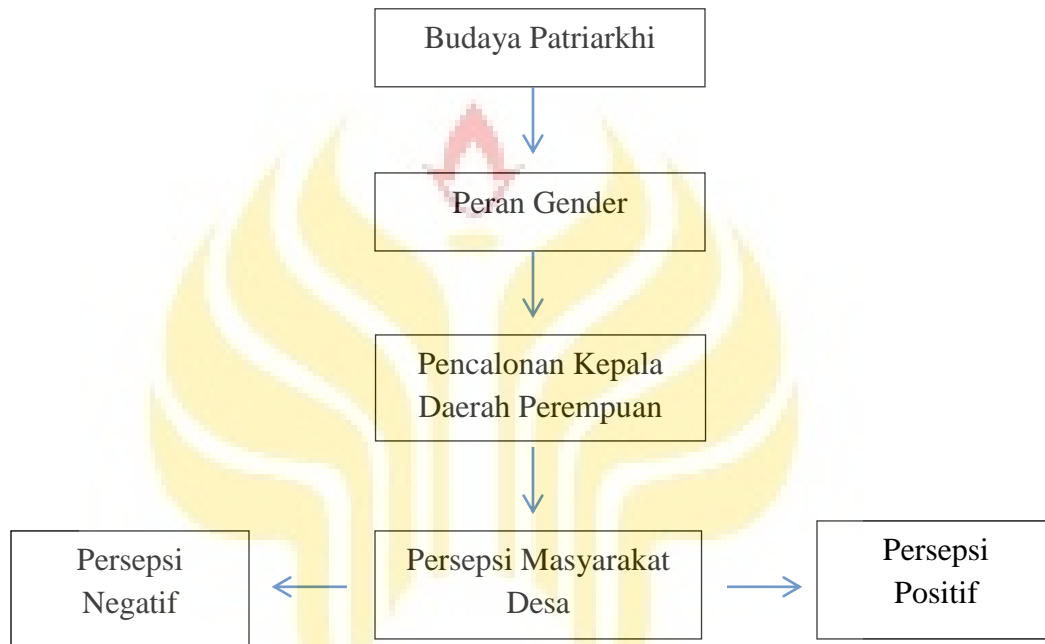
Masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga seperti halnya wilayah-wilayah di Jawa Tengah menganut budaya patriarkhi. Masyarakat yang menganut budaya patriarkhi meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibanding perempuan. Perbedaan gender tersebut melahirkan perbedaan peran. Perempuan masih diperbedakan dalam pendidikan, partisipasi dalam tenaga kerja formal, dan kesempatan berpartisipasi dalam organisasi sosial politik dengan laki-laki. Ketertinggalan perempuan tersebut berpangkal pada pembagian pekerjaan

secara seksual di dalam masyarakat dimana peran utama perempuan adalah lingkungan rumah dan peran utama laki-laki adalah di luar rumah.

Adanya kesenjangan gender tersebut menyebabkan keinginan untuk setara terutama bagi kaum perempuan, feminisme yakni gerakan yang memperjuangkan peran atau partisipasi perempuan sama seperti laki-laki. Maka pada pilkada serentak tahun 2015 perempuan mendominasi posisi calon Kepala Daerah, banyak diantaranya yang berhasil duduk di kursi parlemen, salah satunya di Kabupaten Purbalingga.

Penelitian mengenai persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat memandang kepemimpinan perempuan, dimana kondisi masyarakat yang berada dalam budaya patriarki sekaligus sebagai warga Negara Indonesia dimana hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang. Sehingga hal ini dapat diteliti, yaitu bagaimana persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terhadap pencalonan Kepala Daerah perempuan tahun 2016-2021. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terhadap pencalonan Kepala Daerah perempuan. Dan apakah persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga mempengaruhi pilihan politik mereka.

Bagan 1
Skema Kerangka Berpikir





UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian mengenai persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terhadap pencalonan kepala daerah perempuan tahun 2016-2021 ini dapat diperoleh simpulan sebagai berikut;

1. Pencalonan kepala daerah perempuan pada pemilu Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 memunculkan persepsi yang beragam, sebagian masyarakat berpersepsi positif dan sebagian yang lain berpersepsi negatif. Persepsi positif muncul karena seseorang yang mempersepsi memiliki tanggapan yang baik terhadap pencalonan kepala daerah perempuan. Sedangkan persepsi negatif muncul karena seseorang yang mempersepsi sesuatu dalam hal ini pencalonan kepala daerah perempuan kurang setuju terhadap perempuan yang ikut mengambil peran sebagai kepala daerah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pencalonan kepala daerah perempuan diantaranya; objek yang dipersepsi, alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf dan perhatian.
3. Persepsi masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga mempengaruhi pilihan politik mereka.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul penelitian Persepsi Masyarakat Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terhadap Pencalonan Kepala Daerah Perempuan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut;

1. Bagi masyarakat Desa Arenan
 - a Perlu memahami perbedaan jenis kelamin dan konsep gender untuk meminimalisasi ketidakadilan gender terutama bagi kaum perempuan.
 - b Lebih objektif dalam memberikan persepsi terhadap pencalonan kepala daerah perempuan.
 - c Memberi dukungan terhadap perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Purbalingga
 - a Diperlukan pemahaman gender yang terintegrasi dalam mata pelajaran di lembaga pendidikan agar tidak terjadi kesenjangan gender.
 - b Diperlukan sosialisasi dari aktivis perempuan tentang kesetaraan gender terutama bagi masyarakat pedesaan yang masih kental dengan budaya patriarki.
 - c Lebih memberi ruang kepada perempuan untuk turut serta dalam berbagai kegiatan politik dan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik*. Jogjakarta : Graha Ilmu
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press
- Achmad, Muthali'in. 2001. *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta : Muhammadiyah University
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta : Pusaka Pelajar
- Dzuhayatin, Fakhri, Mansour, (et.al.). 2000. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Murdiyanto, Eko. 2008. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Widyadarmas Press
- Gaus, Gerald F. & Kukathas, Chandran. 2012. *Handbook Teori Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Haynes, Jeff. 2000. *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Humm, Maggie. 2002. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru
- Hoesein, Yasin. 2015. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Jakarta Timur : Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2B)
- Kasiyan, 2008. *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*. Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Kelompok Kerja Convention Watch. 2013. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Depok : Universitas Indonesia
- Kusumaatmadja, Sarwono. 2007. *Politik dan Perempuan*. Depok : KOEKOESAN
- Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparipolitik Perempuan*. Jogjakarta : KANISIUS
- Fakhri, Mansour. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Moleong, J Lexy. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
- Santosa, Anang. 2011. *Bahasa Perempuan Sebuah Potret Ideologi Perjuangan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta

- Syamsuddin, dan Vismaia, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset
- Watkins, et al. 2007. *Feminisme untuk Pemula*. Yogyakarta : Resist Book
- Yentriyani, Andy. 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta : PT Agromedia Pustaka

Web dan referensi lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

http://www.rri.co.id/purwokerto/post/berita/193712/purbalingga/undian_nomor_urut_cabupcawabup_tasditivi_nomor_1_sugengciptu_nomor_2.html diunduh pada 1 Agustus 2016 pada pukul 21.19 WIB

<http://beritajateng.net/pilkada-purbalingga-tasdi-tivi-menang/> diunduh pada 1 Agustus 2016 pada pukul 21.19 WIB